

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

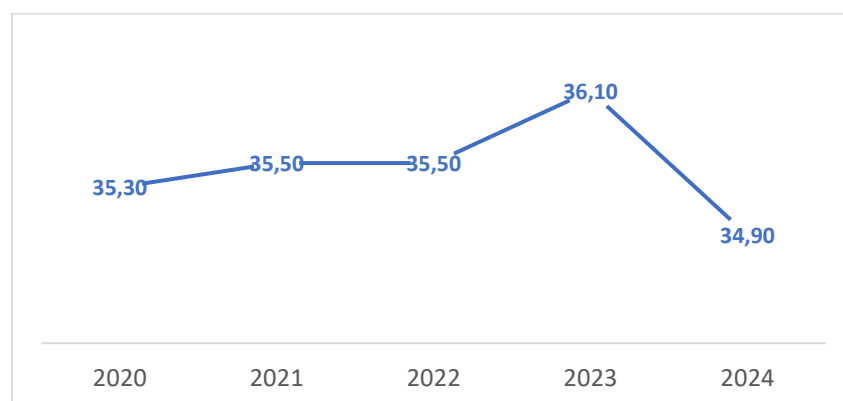
Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan proses jangka panjang yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2006). Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan suatu negara mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan (Kuncoro, 2010). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu merepresentasikan keberhasilan pembangunan apabila tidak disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat.

Ketimpangan pendapatan terjadi disebabkan adanya perbedaan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Sjafrizal, 2018). Distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan perbedaan yang cukup mencolok antar golongan pendapatan. Meskipun pendapatan per kapita suatu negara meningkat, tanpa distribusi yang merata tidak serta-merta memperbaiki kondisi ekonomi seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Perbedaan distribusi pendapatan membuat pendapatan dan pengeluaran setiap keluarga menjadi beragam yang pada akhirnya mempengaruhi besarnya pendapatan yang diterima masyarakat sesuai dengan kategori pekerjaan mereka.

Ketimpangan pendapatan masih menjadi isu penting di negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketimpangan pendapatan umumnya diukur menggunakan

rasio gini atau koefisien gini yang menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan (Todaro & Smith, 2006). Menurut kriteria World Bank (2025), nilai koefisien gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga 100 (ketimpangan sempurna). Data dari *World Bank* menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata beberapa negara Asia. Rata-rata pada tahun 2020 sampai dengan 2024 berdasarkan 22 negara Asia adalah 33,67% yang lebih rendah dibandingkan dengan koefisien gini Indonesia sebesar 35,45%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan distribusi pendapatan di Indonesia belum sepenuhnya stabil.

Nilai koefisien gini Indonesia berada pada kategori ketimpangan menengah yang berkisar pada 34,90 – 36,10 (World Bank, 2025). Posisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak termasuk dengan negara dengan ketimpangan paling tinggi, namun belum mencapai tingkat pemerataan beberapa negara yang memiliki struktur ekonomi lebih maju. Ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan. Berikut adalah koefisien gini di Indonesia.



Sumber: World Bank, 2025

**Gambar 1.1 Koefisien Gini Indonesia Periode 2020-2024 (Persen)**

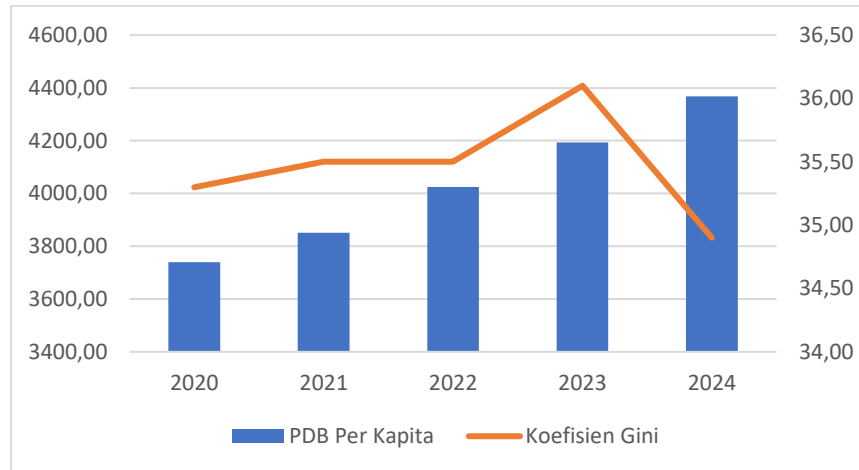
Koefisien gini di Indonesia masih menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang perlu menjadi perhatian. Nilai koefisien gini Indonesia tercatat sebesar 35,5% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 36,1% pada tahun 2023, serta mengalami penurunan tahun 2024 menjadi 34,9%. Meskipun berada pada kategori ketimpangan menengah, kondisi ketimpangan pendapatan di Indonesia juga tidak lepas dari ketimpangan kekayaan yang tinggi. Berdasarkan laporan Oxfam (2017), total harta yang dimiliki oleh empat orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan seratus juta orang miskin di Indonesia yang dapat memperburuk ketimpangan. Selain itu, ketimpangan pendapatan di Indonesia diperkuat dengan pola distribusi pengeluaran rumah tangga dari Badan Pusat Statistik Indonesia (2025) yang menunjukkan bahwa kelompok 20% masyarakat berpengeluaran tinggi masih mendominasi sebesar 45,90% total pengeluaran nasional pada tahun 2024. Sementara itu, 40% kelompok masyarakat berpengeluaran rendah dan sedang memperoleh sebesar 18,4% dan 35,7%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan distribusi manfaat yang merata, akibatnya peningkatan pendapatan lebih terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi dan belum disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan dan berpotensi memperluas ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk yang terus meningkat menunjukkan semakin lebarnya ketimpangan pendapatan kelompok kaya dan kelompok miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan lebih berpihak kepada kelompok berpendapatan tinggi, sementara kelompok

berpendapatan rendah belum memperoleh manfaat pembangunan secara merata. Perusahaan besar dan orang kaya menguasai sebagian besar lahan dan menikmati semua keuntungan. Demikian pula, banyak pekerja Indonesia tidak dapat mengakses pekerjaan yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi dan bergaji lebih tinggi karena sistem pendidikan yang kurang didanai dan hambatan terhadap akses yang adil (Jun & Selvaratnam, 2025). Laju pendapatan orang miskin tidak bisa mengejar kecepatan tumbuhnya harta dari orang kaya, akibat industri yang lebih padat modal sehingga peningkatan kekayaan orang kaya lebih tinggi dari perbaikan pendapatan orang miskin (Rahayu, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa perbaikan distribusi pendapatan di Indonesia belum stabil dan masih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Seiring dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan, hal ini menghambat upaya untuk mengurangi ketimpangan, sebab masyarakat secara bertahap kehilangan kepercayaan pada negara yang dapat menghambat pembangunan ekonomi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendah dan tingginya ketimpangan adalah pendapatan per kapita. Hubungan antara pendapatan dan ketimpangan pendapatan dijelaskan melalui hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan terus meningkat hingga pendapatan rata-rata mencapai titik kritis dan pada tahap selanjutnya menurun seiring dengan meningkatnya lapangan kerja di sektor industri modern, sehingga berbentuk U terbalik (Todaro & Smith, 2006). Perkembangan ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan PDB per kapita dalam beberapa periode tertentu disertai dengan perubahan tingkat ketimpangan pendapatan yang tidak selalu searah. Berikut

merupakan perkembangan PDB per kapita dan koefisien gini di Indonesia periode 2020-2024.



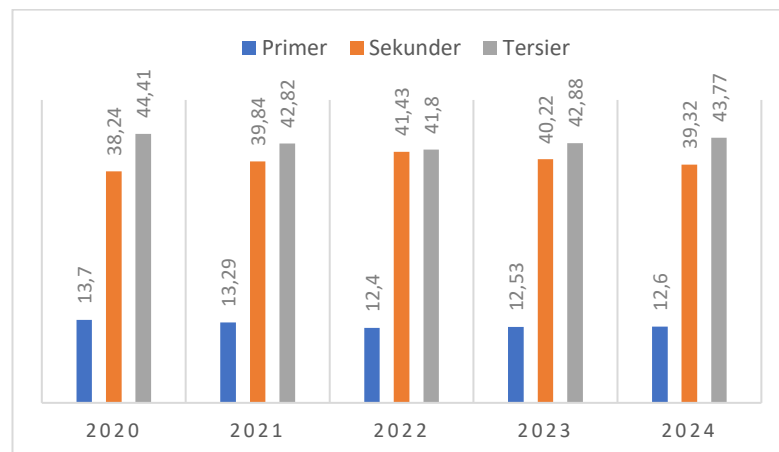
*Sumber: World Bank, 2026*

**Gambar 1.2 PDB Per Kapita dan Koefisien Gini Indonesia Periode 2020-2024**

Berdasarkan gambar 1.2, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, PDB per kapita meningkat dari US\$3.739,45 menjadi US\$4.192,65 disertai dengan peningkatan ketimpangan pendapatan dari 35,30% menjadi 36,10% di tahun yang sama. Peningkatan PDB per kapita disertai dengan peningkatan ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa kenaikan PDB per kapita tidak selalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi belum merata. Peningkatan PDB per kapita menunjukkan adanya kenaikan *output* nasional, namun pertumbuhan tersebut terkonsentrasi pada kelompok masyarakat yang memiliki peluang lebih besar dalam memanfaatkan modal, teknologi, serta akses terhadap pasar internasional. Di sisi lain, masyarakat berpendapatan rendah tidak memperoleh manfaat yang sebanding. Meskipun beberapa studi mendukung hipotesis ini (Hayrullahoglu & Tuzun, 2020; Khan & Khan, 2023), dinamika

ketimpangan di negara berkembang seperti Indonesia lebih kompleks dan tidak selalu sesuai dengan prediksi (Syamhari, 2023).

Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan disebabkan adanya perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktural adalah perubahan jangka panjang dalam komposisi sektoral *output* dan lapangan kerja di suatu negara yang pada akhirnya mempengaruhi distribusi pendapatan (Elhini, 2021). Perubahan struktur ekonomi ditunjukkan dari menurunnya peran sektor primer dan meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam pembentukan PDB dan tenaga kerja (Tambunan, 2016). Struktur ekonomi Indonesia menunjukkan adanya perubahan kontribusi dalam pembentukan PDB di Indonesia dengan sektor tersier atau jasa telah mendominasi pembentukan PDB di Indonesia, namun peningkatan sektor tersier diiringi dengan peningkatan ketimpangan di Indonesia. Berikut adalah data PDB dari sektor primer, sekunder, dan tersier.



*Sumber: World Bank, 2026*

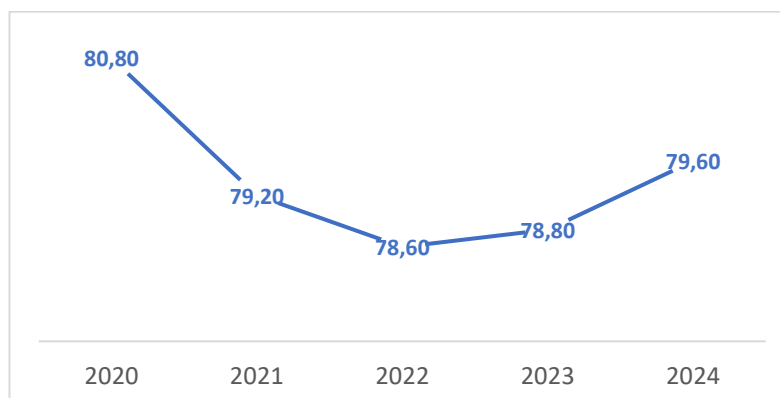
**Gambar 1.3 Kontribusi PDB Berdasarkan Sektor  
Primer, Sekunder, dan Tersier Periode 2020-2024 (Persen)**

Berdasarkan gambar 1.3, Indonesia sudah mengalami pergeseran struktur ekonomi dengan mendominasinya sektor tersier atau sektor jasa terhadap PDB Indonesia sebesar 43,77% pada tahun 2024. Di tahun yang sama, sektor sekunder atau industri mengalami penurunan menjadi 39,33% dan sektor primer dengan kontribusi terendah pada PDB sebesar 12,6%. Pada tahun 2022 hingga tahun 2023, nilai sektor jasa 41,79% meningkat menjadi 42,88% dan pada tahun yang sama disertai peningkatan ketimpangan pendapatan dari 35,5% menjadi 36,10%.

Seiring dengan proses perubahan struktural, peran sektor pertanian sebagai sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar mulai mengalami penurunan. Masyarakat cenderung berpindah ke sektor perekonomian yang lebih padat modal, seperti sektor industri dan jasa. Namun, sektor padat modal dalam proses produksinya lebih mengandalkan penggunaan mesin dibandingkan tenaga kerja manusia (Djunaidi & Alfitri, 2022). Selain itu, pekerja dari sektor pertanian yang memiliki pendidikan rendah dan sulit mendapatkan pekerjaan di industri cenderung pindah ke sektor jasa informal, di mana tingkat pendidikan tidak menjadi hal yang utama dan memiliki upah yang rendah (Jabani et al., 2024). Pekerja dengan keterampilan rendah yang kesulitan masuk ke sektor jasa yang formal cenderung beralih ke sektor jasa yang informal dengan pendapatan rendah, seperti perdagangan serta layanan sosial (Kuntoro & Widyastutik, 2020). Perbedaan pendapatan dalam sektor jasa menjadi penyebab distribusi pendapatan lebih timpang, sehingga peningkatan sektor jasa dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa argumen Kuznets, yang menyatakan bahwa perpindahan sektor dari pertanian ke non-pertanian akan memperburuk

komponen ketimpangan, kemungkinan besar lebih berlaku untuk sektor jasa daripada sektor manufaktur (Baymul & Sen, 2020). Maka dari itu, sektor jasa dijadikan sebagai *proxy* untuk struktur ekonomi.

Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah globalisasi, khususnya melalui liberasi perdagangan yang menjadi salah satu ciri utama perekonomian modern. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan liberalisasi perdagangan, hal ini terlihat dari beberapa kebijakan ekonomi yang diambil pada awal orde baru yang bersifat liberal dan pro pasar (Christianingrum, 2022). Kebebasan perdagangan mencerminkan sejauh mana suatu negara mengurangi hambatan tarif maupun non-tarif dalam aktivitas perdagangan internasional. Stolper-Samuelson menjelaskan perdagangan bebas dapat menurunkan dan meningkatkan distribusi pendapatan melalui harga relatif dan pendapatan faktor produksi (Salvatore, 2017).



Sumber: The Heritage Foundation, 2026

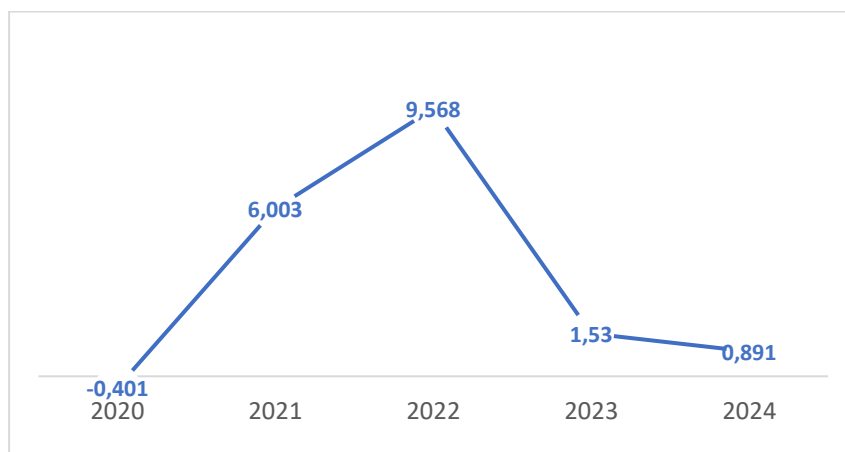
**Gambar 1.4 Trade Freedom Index Indonesia Periode 2020-2024 (Persen)**

Berdasarkan gambar 1.4, *trade freedom index* mengalami peningkatan dari 78,6% pada tahun 2022 menjadi 78,8% pada tahun 2023 yang disertai dengan

meningkatnya ketimpangan pendapatan dari 35,3% menjadi 36,1% pada tahun yang sama. Selain itu, peningkatan kebebasan perdagangan pada tahun 2024 menjadi 79,6% disertai dengan menurunnya ketimpangan pendapatan menjadi 34,90%.

Kebijakan perdagangan bebas memungkinkan arus barang menjadi lebih efisien melalui penurunan hambatan impor maupun peluang ekspor ke pasar internasional. Jika pemerintah berusaha meningkatkan keterbukaan perdagangan, misalnya dengan menurunkan tarif, keseimbangan upah tenaga kerja dengan keterampilan tinggi turun dan untuk tenaga kerja yang memiliki keterampilan rendah akan naik, sehingga akan mengurangi ketimpangan pendapatan (Kuntoro & Widyastutik, 2020). Penghapusan berbagai bentuk intervensi dan hambatan menjadi kan penerapan liberalisasi perdagangan akan mendorong peningkatan volume perdagangan (ekspor dan impor) lebih besar sehingga nilai tambah yang diciptakan juga makin besar. Meskipun demikian, manfaat dari kebebasan perdagangan tidak terdistribusi secara merata. Pelaku usaha berskala besar cenderung memperoleh keuntungan yang lebih luas, sebab hanya segelintir orang yang memiliki akses dalam perdagangan internasional, sehingga bisa memperlebar ketimpangan pendapatan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah inflasi. Menurut Sukirno (2022), inflasi dapat menyebabkan pembagian pendapatan antar golongan masyarakat akan semakin lebar. Hal ini dapat terlihat dari pergerakan inflasi yang terkadang sejalan dengan ketimpangan pendapatan, berikut merupakan data inflasi Indonesia.



*Sumber: World Bank, 2026*

**Gambar 1.5 Inflasi di Indonesia Periode 2020-2024 (Persen)**

Perkembangan inflasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kenaikan dari -0,401% pada tahun 2020 menjadi 9,568% pada tahun 2023 yang sejalan dengan peningkatan ketimpangan pendapatan di tahun yang sama dari 35,30% menjadi 35,50%. Sementara pada tahun 2024, penurunan inflasi dari 1,53% disertai dengan penurunan ketimpangan pendapatan pada tahun yang sama menjadi 34,90%. Dampak dari kebijakan moneter terhadap tingkat inflasi dapat menyebabkan perubahan dalam distribusi pendapatan, sebab pengaruh inflasi berbeda pada berbagai sumber pendapatan. Seperti, harga komoditas berubah jauh lebih cepat dibandingkan dengan upah, serta sumber pendapatan setiap rumah tangga yang berbeda menunjukkan bahwa efek inflasi terhadap total pendapatan rumah tangga bersifat heterogen (Glawe & Wagner, 2024). Pertumbuhan inflasi akan berdampak buruk bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan akan menciptakan ketimpangan pendapatan, jika peningkatan ini berlangsung dalam jangka panjang akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan menciptakan ketimpangan yang semakin melebar (Kardita et al., 2018).

Kegagalan mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih merata tidak hanya berdampak buruk pada aktivitas ekonomi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, politik dan keamanan. Kesenjangan yang lebar dapat menimbulkan kecemburuan sosial, hingga risiko kerusuhan dan gerakan separatis. Pembangunan ekonomi tidak sama dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita, sedangkan kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti kenaikan pendapatan per kapita (Nilasari & Amelia, 2022). Kuznets berpendapat bahwa kelompok berpendapatan tinggi cenderung menyumbang lebih besar terhadap akumulasi modal dan tabungan, sedangkan kelompok lain memiliki keterbatasan dalam hal tersebut. Perbedaan kemampuan menabung ini, jika faktor lain tetap, akan meningkatkan porsi pendapatan kelompok kaya dan memperkuat dominasi ekonomi mereka, sehingga memperlebar kesenjangan.

Hubungan tidak linier antara pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan telah banyak dilakukan melalui pengujian hipotesis Kuznets. Tinjauan literatur yang tersedia menunjukkan bahwa sebagian besar studi fokus pada hubungan antara pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan, di mana sedikit upaya dilakukan untuk memeriksa pada kajian yang sama. Beberapa peneliti sebelumnya seperti Khan & Khan (2023) dan Hayrullahoglu & Tuzun (2020) menganalisis mengenai pendapatan per kapita yang meningkat pada jangka pendek dan menurun dalam jangka panjang. Sementara, penelitian Ramadhani & Marwan (2023), menjelaskan bahwa hipotesis Kuznets tidak terbukti. Penelitian mengenai struktur ekonomi sektor jasa, kebebasan perdagangan, dan inflasi terhadap

ketimpangan menunjukkan hasil yang belum konsisten. Raeskyesa (2020) menemukan bahwa pengaruh transformasi struktur ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dengan sektor jasa berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, sementara studi Asman et al. (2024), sektor jasa memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian mengenai kebebasan perdagangan atau *trade freedom* terhadap ketimpangan pendapatan masih terbatas di Indonesia. Nazirou et al. (2022) menemukan bahwa kebebasan perdagangan berpengaruh positif, sementara penelitian Kandogan & Johnson (2024) menunjukkan pengaruh yang negatif antara *trade freedom* dan ketimpangan pendapatan. Penelitian mengenai inflasi terhadap ketimpangan yang dilakukan oleh Astarly et al., (2024) menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sementara penelitian Saraswati et al. (2020) menemukan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang, inflasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat *gap* untuk menganalisis dengan mempertimbangkan pendapatan per kapita, struktur ekonomi sektor jasa, kebebasan perdagangan, dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dengan menganalisis sejauh mana hipotesis Kuznets relevan antara pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan dan bagaimana peran struktur ekonomi sektor jasa yang padat modal dan perdagangan bebas yang diukur dengan kebebasan perdagangan, serta inflasi dapat mempengaruhi ketimpangan di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penentu Ketimpangan Pendapatan dan Kajian *Kuznets Curve Hypothesis* di Indonesia Tahun 1998-2024”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh jangka pendek dan jangka panjang PDB per kapita, struktur ekonomi sektor jasa, *trade freedom*, dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 1998-2024?
- b. Apakah *Kuznets Curve Hypothesis* atau KCH berlaku dalam jangka panjang di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dirumuskan sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan jangka panjang PDB per kapita, struktur ekonomi sektor jasa, kebebasan perdagangan, dan inflasi di Indonesia periode 1998-2024
- b. Untuk mengetahui keberadaan *Kuznets Curve Hypothesis* atau KCH dalam jangka panjang di Indonesia

## 1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

### 1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman teoritis mengenai dinamika ketimpangan pendapatan di Indonesia yang tidak hanya dipengaruhi oleh PDB per kapita yang kaitannya dengan hipotesis Kuznets dalam proses pembangunan di Indonesia, tetapi juga oleh perubahan struktur ekonomi dan kebijakan perdagangan melalui variabel *trade freedom*, dan inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini juga diharapkan mampu melengkapi dan menambah temuan empiris penelitian terdahulu yang masih menunjukkan perbedaan hasil penelitian.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia, terutama perubahan pada *Kuznets Curve Hypothesis* atau KCH yang terus berubah seiring dengan perkembangan struktur perekonomian.

## 1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi *World Bank*, dan *The Heritage Foundation*.

### 1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2025, diawali dengan pengajuan judul kepada pihak jurusan Ekonomi Pembangunan dengan tujuan agar penelitian ini mampu menyelesaikan sesuai dengan matriks yang dibuat oleh penulis.

### Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

[illegible]